

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2014, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adjie, Habib, 2009, *Percikan tentang Jabatan dan Akta PPAT*, Revika Aditama, Bandung.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Fajar, Mukti, Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta.
- Hasan, Djuhaendah, 2004, *Kajian Peraturan Pertanahan*, PT Harfarindo, Jakarta.
- HS, Salim, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Cet ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.R., Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Remadja Karya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti, Affan, 2006, *Pokok-Pokok Bahasan Hukum Agraria*, USU Press, Medan.
- Nawawi, Hadari, 1989, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta.
- Sigian, 2003, *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sujanto, 1994, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Thoha, Miftah, 2002, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yamin Lubis, Muhammad dan Rahim Lubis, 2012, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional*, Mandar Maju, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 526/SK.32.HP.03.04/XII/2020 tentang Perubahan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Pangandaran;

Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. Karya Ilmiah (Skripsi/Tesis/Disertasi) dan Artikel Jurnal

Ayu Wulan Rismayanthi, Ida, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah yang Menjadi Obyek Sengketa”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali, 2016.

Hagabeau, Ivan Stevanus, “Analisis Yuridis terhadap Pembinaan dan Pengawasan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Medan”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.

Amin Handoko, “Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Dalam Upaya Meningkatkan Pendaftaran Hak atas Tanah”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Irsan Sugeng, Muhammad, “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Gowa”, *Jurnal Yustisiabel*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Gowa, Vol. 4, No. 2, Oktober 2020, hlm 187.

Kurniady Noor, Ade, “Tugas dan Fungsi PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Administrasi Pertanahan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat”, *Jurusan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2016.

Maharani Wibowo, Terry, “Pembinaan dan Pengawasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Terhadap PPAT dan PPATS”, *Justitia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 2 No. 2, Oktober, 2018.

- Mulyana Darusman, Yoyon, “Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Vol. 7 No 1, 1998.
- Prihadi Manggala, Akbar, “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (Hak Milik) Berdasarkan Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan”, *Jurusan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Rahmi, Elisa, “PPAT Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia (Studi PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT)”, *Jurnal Notariil*, Universitas Jambi, Jambi, Vol. 1 No 1, November, 2016.
- Safii, Muhammad, Marsudi Triatmodjo, “Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Yogyakarta”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.
- Sahnan, “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Lombok, Vol. 7, No. 3, Desember 2019.
- Santoso, Teguh Imam, Sudirman Mehsan, Upik Hamida, “Pelaksanaan Pengawasan terhadap Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Kantor Pertanahan di Kota Bandar Lampung”, *Fiat Justisia*, Jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Vol. 8 No 2, 2014.
- Terry Maharani, Amin, “Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian Laporan Bulanan Akta yang Telah Dibuat Dihadapan PPAT kepada Kantor Pertanahan”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Semarang, 2010.
- Winarsi, Sri, “Pengaturan Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah Sebagai pejabat Umum”, *Majalah Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 17 No. 2, Maret 2002.

D. Sumber Internet

- Badan Pertanahan Nasional, “Struktur Organisasi Kantor Pertanahan”, <https://www.atrbpn.go.id/?menu=strukturOrganisasi> diakses pada tanggal 23 Maret 2021.



**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
OLEH MAJELIS PEMBINA DAN
PENGAWAS DAERAH DAN KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN PANGANDARAN**

ANNISA RIANI ARTHA, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "<https://kbbi.web.id/pembinaan>, diakses tanggal
12 September 2020